

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ekonomi yang makin terbuka, ekonomi makin berorientasi pada pasar (Salim, 1997 : 1). Peluang dari keterbukaan dan persaingan pasar belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat. Pemihakan kepada perekonomian rakyat berarti memberikan perhatian khusus kepada upaya peningkatan ekonomi rakyat. Berkaitan dengan hal ini Sumodiningrat (1997 : 5) menyatakan :

“Perhatian khusus ini diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses rakyat kepada sumberdaya pembangunan disertai penciptaan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat posisi daya saing ekonominya”.

Dasar untuk itu sesungguhnya telah kita bangun sekarang ini. Amanat yang tertuang dalam GBHN 1998 sebagai pencerminan kehendak rakyat mewujudkan kuatnya penekanan yang diberikan pada pembangunan yang berkeadilan. Segenap upaya pembangunan yang dituangkan dalam berbagai kebijaksanaan dan program bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sumberdaya pembangunan yang harus



ditingkatkan kualitas dan kemampuannya. Upaya ini digariskan dalam GBHN (1998 : 32) sebagai sasarannya, yaitu terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Husken (1997 : 8) mengungkapkan bahwa menurunnya jumlah penduduk miskin dari 70 juta atau 60 % pada tahun 1970 menjadi 27,2 atau 15,1% pada tahun 1990 merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan sektoral dan regional yang secara langsung dan tidak langsung ditujukan untuk kemiskinan. Meskipun telah jauh berkurang, jumlah penduduk miskin tersebut masih cukup besar sehingga diperlukan upaya khusus untuk membantu kaum miskin ini terlepas dari kemiskinan. Dewasa ini, dengan adanya krisis moneter, pada kenyataannya penduduk miskin menjadi tambah banyak. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS, 1998) sampai Juni 1998, jumlah penduduk miskin sekitar 79, 4 juta orang atau 39,1 % dari jumlah penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 205 juta jiwa. Dilihat dari wilayahnya, penduduk miskin di perkotaan pada pertengahan tahun 1998 mencapai 22,6 juta orang atau sekitar 28,8 % penduduk perkotaan. Sedangkan penduduk miskin di pedesaan sekitar 58,8 juta orang atau sekitar 45,6 % penduduk pedesaan.

Selanjutnya dari laporan BPS tersebut terungkap bahwa penentuan penduduk miskin itu didasarkan pada garis kemiskinan dengan perhitungan pendapatan per kapita per bulan yaitu Rp. 52.470 untuk penduduk perkotaan dan Rp. 41.588 untuk warga pedesaan. Batas garis kemiskinan ini naik dibandingkan dengan tahun 1996 yang angka per kapitanya senilai RP. 38.246 untuk perkotaan

dan Rp. 27.413 bagi penduduk desa. Untuk garis kemiskinan per keluarga dengan asumsi satu keluarga terdiri dari dua orang tua dan dua orang anak untuk per bulan pada pertengahan 1998 ditetapkan Rp. 227.720 untuk warga kota dan Rp. 177.977 bagi penduduk desa.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Soemardjan (1980 : 19) mengatakan “keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif”. Selain itu, berdasarkan pola waktunya Kartasasmita (1996 : 235) membedakan kemiskinan menjadi beberapa katagori yaitu, *persistent poverty*, *cyclical poverty*, *seasonal poverty*, serta *accidental poverty*.

Bila dikaji dari pola waktu, kemiskinan di suatu daerah dapat digolongkan sebagai *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Daerah seperti itu pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana

alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Kriteria yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS, 1994) untuk mengukur garis kemiskinan tersebut adalah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan minimum untuk hidup ini diukur dengan pengeluaran untuk makanan setara 2.100 kalori per kapita per hari ditambah pengeluaran untuk non makanan yang meliputi perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian dan barang tahan lama. Kemiskinan absolut umumnya disandingkan dengan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.

Ditinjau dari akar atau penyebab kemiskinan, dikenal adanya kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural (Kartasasmita, 1996 : 239). Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Mereka sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan. Merekapun tidak terlalu tergerak berusaha untuk

memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya sehingga menyebabkan pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang umum dipakai. Menurut Tjokrowinoto (1993 : 20) budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, kurang menghargai diri sendiri, kurang percaya diri, rendahnya etos kerja dan ketidakmampuan berwiraswasta.

Lewis (1968 : 24) seorang antropolog yang meneliti tentang budaya kemiskinan, menyatakan karakter individu yang miskin adalah sebagai berikut :

“... high incidence of maternal deprivation, of orality of weak ego structure; lack of impulsive control; strong present - time orientation, with relatively little ability to defer gratification and to plan for the future; sense of resignation and fatalism; widespread belief in male superiority; and high tolerance of psychological pathology of all sorts ... provincial and locally oriented, have very little sense of history, ... very sensitive to status distinction.”

Friedmann (1979 : 131), menggambarkan, bahwa orang-orang miskin berbuat sesuai dengan dunianya sendiri. Mereka asing bagi kebudayaan kita. Nilai-nilai mereka berbeda. Dan bahkan, mereka berbicara dengan bahasa yang lain, kita harus belajar dulu baru bisa memahaminya.

Friedmann (1979 : 127) juga mengatakan “orang miskin menjadi miskin karena perbuatan orang lain. Itulah sistem. Ada hak-hak mereka yang ditindas. Eksistensi kemanusiaan mereka ?, artinya orang-orang menjadi miskin bukan karena nasib malang atau kelemahan pribadi melainkan karena terjepit oleh struktur-struktur ekonomi yang berkaitan erat dengan kekuasaan politik dan kebudayaan yang tidak adil, inilah yang dinamakan kemiskinan struktural”.

Sejalan dengan uraian tersebut Tjokrowinoto (1993 : 30) mengatakan bahwa kemiskinan ini adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional

dan sosial menghadapi elite desa dan para birokrat yang menentukan keputusan yang menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri.

Dari sisi pemahaman kemiskinan, yang dikaitkan dengan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Friedmann (1979 : 129 - 130) mengungkapkan

“... jika anda punya kesempatan untuk mencapai kekuasaan, maka anda tidak miskin. Anda dapat menolong diri anda sendiri, anda dapat membentuk kehidupan anda sendiri. Anda berbahagia. Tetapi bila anda miskin, anda tidak bebas, anda tidak produktif, anda tidak beraksi / bertindak, anda tidak makan, anda kehilangan harapan. Dan kehilangan harapan berarti anda mati. ... kemiskinan struktural ini mengandung suatu penyelesaian yang implisit; memberi kuasa kepada orang miskin (*empowerment of the poor*). Jika kemiskinan berarti kurangnya kesempatan untuk mencapai kekuasaan, maka anda tidak menjadi miskin lagi bila anda memperoleh kesempatan. Tetapi bagaimanakah kesempatan itu anda peroleh kalau mereka yang menduduki posisi-posisi istimewa akan menghalangi anda ? Hanya melalui perjuangan. Perjuangan melawan kemiskinan demi kesejahteraan hidup manusia tidak pernah mengenal kata akhir. Kemiskinan adalah suatu fenomena politik.”

Apabila kita menyimak uraian-uraian di atas, maka kita dapat menangkap suatu permasalahan yaitu adanya ketidakseimbangan dalam kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan. Dengan proses pembangunan yang terus berlanjut, justru ketidakseimbangan itu dapat makin membesar yang mengakibatkan makin melebarnya jurang kesenjangan. Dalam upaya mengatasi tantangan itu diletakkan strategi pemberdayaan masyarakat. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu

meningkatkan kemampuan rakyat dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensi yang dimilikinya, dengan kata lain, memberdayakannya.

Upaya yang merupakan pengeralahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Jadi partisipasi rakyat meningkatkan emansipasi rakyat.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi fokus pembangunan sejak Pelita I (1969). Seluruh aparat birokrasi dikerahkan untuk menyukseskan program ini. Para sarjana diterjunkan ke desa-desa untuk menjadi pembimbing bagi masyarakat tertinggal itu. Miliaran rupiah setiap tahun dialokasikan bagi pengentasan masyarakat yang termasuk kategori prasejahtera tersebut (Gana dan Wardani, 1998 : 85). Dari program Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK) pada Pelita I dan II, perwujudan Delapan Jalur Pemerataan yang dituangkan dalam berbagai program sektoral maupun regional, pemberian fasilitas kredit

lunak, sampai program Inpres Desa Tertinggal (1993), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takestra), dan Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra) yang disponsori BKKBN. Sejalan dengan program-program pemerintah itu, salah satu organisasi kemasyarakatan yaitu Mathla'ul Anwar membuat suatu "model" yang disebut dengan program Pengentasan Kemiskinan Bagi Pemuda Pedesaan Melalui Sistem Orang Tua Angkat.

Memperbincangkan bagaimana cara dan bentuk-bentuk apa saja yang sekiranya dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yang dialami oleh manusia, maka itu berarti, kita secara langsung telah melaksanakan dua macam perintah agama sekaligus. Karena pertama, kita membina *ukhuwwah*, dan kedua, menyantuni sesama yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Konsep kemiskinan yang dimaksud dalam model ini adalah seluruh keadaan yang dialami dan serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup seseorang atau sekelompok masyarakat yang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an disebut *du'afa*. Ini berarti bahwa siapa saja yang merasa kurang beruntung dan tertindas dalam kehidupannya di dunia ini adalah masuk kategori *Mustad'afin*. Terhadap kelompok ini Allah mengingatkan "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak "(QS, An-Nisa' / 4 : 75). Begitu luasnya cakupan makna *du'afa* itu, maka diantaranya adalah kemiskinan. Karena kemiskinan adalah suatu bentuk konkret dari *kedu'afaan*. Kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai persoalan ekonomi semata, melainkan yang lebih penting dari itu ialah

kemiskinan immaterial. Jika demikian, maka dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat, terlebih dahulu membenahi keyakinan masyarakat yang kemudian diikuti oleh pembenahan di bidang materi.

Fakta yang berkembang dalam masyarakat kita ialah adanya keyakinan akan keadaan yang dialami itu adalah taqdir yang diberikan Allah SWT kepadanya, karena itu ini tak mampu dielakan lagi. Majid dalam tulisannya (Pikiran Rakyat, 7 Oktober 1994 : 4) menyatakan bahwa bukti keyakinan itu akan terlihat mulai dari kakek, nenek, bapak, ibu dan anak dalam sebuah keluarga melalui suatu ungkapan “Bagaimanapun usaha yang kami lakukan untuk mencari nafkah demi peningkatan taraf kesejahteraan keluarga kami, adalah suatu yang tak mungkin, karena kami memang berasal dari keluarga orang-orang miskin”. Ungkapan yang menjelma menjadi keyakinan itu akan melahirkan suatu pandangan yang serba pasrah yang diikuti oleh reaksi emosional dan tawakkal sepenuhnya kepada Allah SWT. Dampaknya ialah menciutnya semangat berikhtiar. Sikap dan pandangan yang demikian ini sering dikategorikan ke dalam fatalisme. Dalam hubungan kemiskinan dengan sikap dan pandangan yang demikian itulah lahir konsep budaya kemiskinan dan kemiskinan struktural. Jika demikian, maka pertanyaan yang dapat kita ajukan ialah sudah betulkah pemahaman umat selama ini terhadap apa itu taqdir dan apa pula itu tawakkal ?.

Taqdir dapat dipahami sebagai ketentuan yang bukan semata-mata berada pada pihak kekuasaan Allah semata, tetapi ketentuan itu sendiri sedikit banyak ikut ditentukan oleh sikap hamba-hamba-Nya. Artinya, kita akan dapat

membimbing diri untuk berpindah atau memilih terhadap satu taqdir Allah ke taqdir-Nya yang lain. Sedangkan tawakkal ialah sikap dari seseorang hamba Allah untuk menyerahkan segala jerih payahnya, terserah Allah menilai dan meridoinya. Tidak secepatnya tawakkal tanpa didahului oleh ikhtiar yang optimal. Ungkapan “kalau memang sudah rezeki saya, akan datang dengan sendirinya”, atau “yang penting adalah pasrah saja kepada Tuhan, toh Dia-lah yang mengaturnya”. Tuntunan Allah dalam Al-Qur’an mengenai hal itu, antara lain “Mengapa kami tidak akan bertawakkal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakkal itu berserah diri.” (QS, Ibrahim /14 : 12).

Dari uraian di atas, model pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Mathla’ul Anwar ini, ialah melalui program pendidikan keterampilan dibidang pertanian. Mathla’ul Anwar menghimpun para pemuda yang ada di pedesaan, dan kegiatan yang dilakukan yaitu membina dan mengarahkan para pemuda pada usaha produktif dalam sektor pertanian dengan modal usaha diupayakan diperoleh dari pada donatur (baik perorangan maupun lembaga) yang bersedia untuk menjadi orang tua angkat bagi para pemuda tersebut.

Program pendidikan keterampilan ini bertujuan membina para pemuda desa agar mereka dapat mandiri serta berdaya secara ekonomi. Dan sasaran yang ingin dicapainya antara lain :

1. Dapat mengoptimalkan dan mengembangkan potensi desa, terutama pertanian sehingga lahan yang selama ini terlantar dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan berkembangnya sektor tersebut di atas, diharapkan dapat berdampak pada sektor kehidupan lainnya.
2. Dengan dibinanya kelompok pemuda secara intensif, diharapkan dapat berimplikasi dan berpengaruh pada lingkungan sosial sekitar, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan kegiatan positif lainnya secara suadaya.
3. Minimal mengurangi, maksimal dapat menyetop arus pemuda berurbanisasi ke kota-kota besar, bahkan secara ideal dapat menarik kembali para pemuda yang sudah terlanjur ke kota, dapat kembali ke desanya (*nuralisasi*), karena tertarik oleh kegiatan tersebut.
4. Mereka diharapkan dapat menguasai dan terampil dalam teknik bertani, yang nantinya diharapkan mereka dapat mentransfer keahliannya pada anggota pemuda lainnya. Akhirnya para pemuda diharapkan dapat menghidupi dirinya secara layak tanpa harus selalu bergantung pada pihak lain.

Esensi dari sasaran program di atas pada dasarnya adalah meningkatkan etos kerja umat yang oleh Allah disebutkan sebagai amal saleh, diikuti oleh profesionalisme atau keahlian masing-masing di mana mereka bekerja. Karena dengan amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang niscaya akan memperoleh hasilnya di dunia secara maksimal dan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Standar amal saleh ditentukan oleh ajaran Islam itu sendiri dengan kriteria ; *pertama*, orang yang melakukannya harus baik; dan *kedua*, yang dikerjakannya itu

harus baik pula. Jadi di sini terlihat jelas hubungan antara kebaikan orang dengan pekerjaan yang diperbuatnya.

Secara keseluruhan, dapatlah diartikan bahwa program pendidikan keterampilan yang dilaksanakan oleh Mathla'ul Anwar ini diharapkan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya seperti etos kerja, rasa percaya diri dan harga diri, tetapi juga nilai tambah secara ekonomis. Sedangkan peranan orang tua angkat itu sendiri merupakan penyantun bagi para pemuda desa untuk dibina dalam bidang usaha produktif, sehingga mereka dapat mandiri.

B. Masalah Dan Perumusannya

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Akar dari permasalahan kemiskinan itu sendiri adalah kultural dan struktural, antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat dirubah (konsep taqdir dan tawakkal yang salah), yang tercermin didalam lemahnya kemauan untuk maju, etos kerja yang rendah, mudah putus asa, kurang percaya diri dan kurang menghargai diri sendiri. Secara struktural, terbatasnya modal yang dimiliki karena tidak memiliki akses pada pemilik modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk mengentaskan penduduk dari lingkaran kemiskinan diperlukan juga sikap yang tidak memperlakukan orang hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun,

melainkan orang yang mempunyai sesuatu, walaupun hanya sedikit. Maka pengentasan kemiskinan yang bertujuan mengurangi jumlah orang miskin dan kesenjangan pendapatan antar kelas di masyarakat menjadi prioritas agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karenanya apa yang diprogramkan oleh Mathla'ul Anwar dalam membantu pemerintah untuk pengentasan penduduk miskin menarik penulis untuk menelitinya.

Masalah penelitian ini terarah kepada suatu gambaran yang jelas tentang “model” Pengentasan Kemiskinan Bagi Pemuda Pedesaan melalui Sistem Orang Tua Angkat yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Dana Firdaus Mathla'ul Anwar di Desa Sukajaya Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan program pengentasan kemiskinan bagi pemuda pedesaan melalui Sistem Orang Tua Angkat ?
2. Bagaimana hasil dan dampak dari program Sistem Orang Tua Angkat ini ?

Permasalahan di atas akan didekati lagi secara lebih rinci melalui pertanyaan (fokus) penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem orang tua angkat ?. Hal ini mencakup aspek-aspek :
 - a. Bagaimana tujuan, program, fasilitas, tenaga pengelola program, sumber belajar dan fasilitas lainnya ?
 - b. Bagaimana peranan orang tua angkat dalam program pelatihan ini ?

- c. Bagaimana keadaan lingkungan yang dapat menunjang dan mendorong berjalannya program pelatihan ini ?
 - d. Bagaimana interaksi belajar dalam program pelatihan ini ?
2. Bagaimana hasil dan dampak dari program ini ?. Hal ini mencakup aspek :
- a. Ekonomi (peningkatan pendapatan peserta pelatihan).
 - b. Perubahan perilaku peserta pelatihan.
 - c. Mengikutsertakan orang lain dalam memanfaatkan hasil belajar yang telah dimiliki.

C. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan penelitian dalam penulisan ini :

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Model Pengentasan Kemiskinan Bagi Pemuda Pedesaan Melalui Sistem Orang Tua Angkat.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengungkapkan data tentang realisasi pelaksanaan program pemberdayaan dalam aspek ekonomi bagi pemuda pedesaan melalui Sistem Orang Tua Angkat.
- b. Untuk mendapatkan data tentang hasil dan dampak dari pelaksanaan program ini.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian berupa studi kasus pemberdayaan dalam aspek ekonomi terhadap kelompok pemuda pedesaan di Desa Sukajaya Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara konseptual teoritis, maupun secara praktis di lapangan.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori yang ada, khususnya berkaitan dengan peranan pendidikan luar sekolah, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pengkaji dan pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah dalam melengkapi dan mengembangkan berbagai macam program.

Secara praktis di lapangan, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pengelolaan program-program kegiatan pendidikan luar sekolah, baik bagi perencana maupun pelaksana di lapangan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selanjutnya program ini bisa dijadikan alternatif “model” pengentasan kemiskinan di tempat lain sebagai patner dari program pemerintah.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih jelasnya arah penelitian dan agar terhindar dari kemungkinan adanya salah tafsir, maka diperlukan definisi operasional dari beberapa istilah penting, sebagai berikut :

1. Model

Dalam Ensiklopedi Indonesia (jilid 4), dijelaskan bahwa “model” merupakan kata pengecil dari modo = sifat, cara dan representasi diperkecil dari suatu benda atau keadaan yang dimaksudkan untuk menggambarkan, menjelaskan atau menemukan sifat-sifat bentuk aslinya.

Berdasarkan pengertian model di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan model dalam penelitian ini ialah langkah-langkah yang dipergunakan dalam proses pemberdayaan pada aspek ekonomi bagi peserta pelatihan yang secara umum tergambar dari, (a) aspek manajemen pelatihan, seperti identifikasi permasalahan, seleksi peserta pelatihan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan; (b) fungsi kelembagaan (NGO) yang dilihat dari program, faktor pendukung dan metode; juga (c) penerapan perolehan (pengetahuan dan keterampilan) setelah melalui proses pembelajaran.

2. Pengentasan Kemiskinan

Istilah “pengentasan kemiskinan” menurut Gana dan Wardani (1998 : 90) masih kontroversial. Jadi pengentasan kemiskinan berarti kemiskinannya yang dientaskannya (Budihardjo, 1994 : 21) istilah yang tepat adalah “mengentaskan manusia dari kemiskinannya”, karena manusianya yang dientaskan dan bukan kemiskinannya. Pendapat ini pun didukung oleh Fatimah Djajasudarma (Pikiran Rakyat, 5 Oktober 1999 : 1) yang menyatakan bahwa mengentaskan sama dengan mengangkat. Jadi pengertian yang seharusnya muncul ialah mengentaskan dari kemiskinan dengan kata lain mengangkat manusia dari kemiskinannya. Pada

kesempatan lain, ada pengamat yang lebih senang menyebut “pemerataan pendapatan atau ekonomi”, sebab program yang dilancarkan bermaksud mempersempit jurang antara yang berpendapatan tinggi dengan yang rendah. Dan program yang dilaksanakan dalam penelitian ini bertujuan membina perilaku peserta pelatihan ke arah yang lebih baik yang ditandai dengan adanya *self respect* dan percaya pada kemampuan sendiri, mandiri, juga mempunyai tanggung jawab yang luas. Selain itu agar mereka mampu mengelola sumber daya alam yang tersedia bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya, khususnya pada bidang agribisnis yang pada akhirnya pendapatan perekonomiannya meningkat dan mengangkat dirinya dari kondisi kemiskinan yang selama ini mereka alami.

3. Sistem Orang Tua Angkat

Menurut Awad (1979 : 4) istilah sistem mempunyai pengertian “*an organized, functioning relationship among units or components*”. Jadi kalau kita telaah, istilah system itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan (*a whole*). Kaitannya dengan program pelatihan ini adalah merupakan suatu totalitas yang terdiri dari bagian-bagian antara lain lembaga-lembaga yang terkait bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu adanya perubahan perilaku dan peningkatan pendapatan peserta pelatihan.

Sedangkan yang dimaksud daripada orang tua angkat dalam program ini adalah perorangan atau lembaga yang menyantuni atau menghibahkan sebagian hartanya untuk membantu peserta pelatihan. Setiap peserta mengetahui bapak

angkat yang mensponsori pembiayaan kegiatan masing-masing. DFMA mendorong terjadinya hubungan komunikasi antara anak dan bapak angkat, misalnya melalui surat-menyurat atau bertatap muka langsung dalam berbagai kesempatan. Pengembangan dan pergantian anak angkat, dilaporkan dan atas sepengetahuan bapak angkat yang bersangkutan.

Jadi hubungan antara bapak dan anak angkat ini, bukan dalam pengertian *adopsi* yaitu pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Dalam syariat Islam tidak mengenal pengertian *adopsi*, sebab *adopsi* pada hakikatnya tidak mengubah fakta, bahwa nasab anak itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada orang lain. Nasab tidak pernah bisa dihapuskan dan tidak pula diputuskan. Ini didasarkan atas ayat yang artinya, berikut ini :

“... dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah...” (Qs, Al-Ahzab / 33 : 4-55)

Dari keterangan di atas, maka pengertian operasional dari sistem orang tua angkat ini adalah hubungan kerjasama antara komponen-komponen yang terlihat pada kegiatan pelatihan ini, seperti orang tua angkat sebagai penyanggah dana yang berarti hanya sampai taraf memberikan kesempatan, serta lembaga Mathla'ul Anwar sebagai penyelenggara yang memberikan suasana kondusif demi tercapainya tujuan pendidikan yaitu perubahan perilaku dan pemuda pedesaan sebagai subjek yang aktif dan kreatif pada konteks partisipatif di dalam kegiatan

pelatihan tersebut atau seperti yang dikemukakan oleh Paul (1987 : 24) sebagai berikut : “...*participation refers to an active process where by beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than merely receive a share of project benefits.*” Pernyataan tersebut mendukung adanya gambaran keterlibatan peserta pelatihan mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan sampai pada evaluasi.

4. Pemberdayaan.

Kata pemberdayaan harus diucapkan secara hati-hati, agar tidak terpeleset menjadi “memperdayakan”. Penggunaan kata “*empowerment*” dan “*empower*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata “*empower*” mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Dan pengertian istilah yang kedua inilah yang digunakan pada tesis ini.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka proses pemberian kemampuan atau keberdayaan pada intinya adalah upaya pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dari pada peserta pelatihan akan potensi yang dimilikinya, memiliki keinginan, motivasi dan kemampuan untuk memanfaatkan



sumber daya alam yang dalam hal ini berkaitan dengan agribisnis dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dari para peserta pelatihan. Dan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses menumbuhkan keberdayaan tersebut adalah (a) belajar dilakukan pada kelompok kecil yaitu 5 orang; (b) pemberian tanggung jawab yang lebih besar diberikan kepada peserta pelatihan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran; (c) kepemimpinan kelompok dilakukan oleh dan dari peserta pelatihan sendiri; (d) sumber belajar hanya bertindak sebagai fasilitator; (e) dalam proses kegiatan belajar berlangsung secara demokratis; (f) metode dan teknik pembelajaran digunakan yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta pelatihan; (g) dan tujuan akhir adalah untuk dapat meningkatkan taraf hidup dari para peserta pelatihan.

